KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR Akhirnya Sahkan UU Perlindungan PRT
**Tanggal** : Rabu, 22 April 2026
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 1-15

LEGISLASI

# DPR Akhirnya Sahkan UU Perlindungan PRT

**JAKARTA, KOMPAS** – Setelah 22 tahun terkatung-katung, payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga akhirnya terbit. Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (21/4/2026), menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan jadi undang undang dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Peristiwa yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini 2026 ini dinilai sebagai tonggak sejarah baru bagi emansipasi, sekaligus penegasan sikap negara atas perlindungan hak-hak PRT di Indonesia, yang mayoritas kaum perempuan.

Melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), antara lain diatur bahwa PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, usia minimal PRT adalah 18 tahun. Namun, mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang itu berlaku, diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Ketua DPR Puan Maharani

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-7)



KOMPAS/ADRIAN YOGA PARAMADYA

**Anggota** Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menangis haru setelah DPR menyetujui RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

# DPR Akhirnya Sahkan UU Perlindungan PRT

(Sambungan dari halaman 1)

dalam pidato penutup sidang menegaskan, UU PPRT hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi PRT sekaligus mengatur hubungan kerja di sektor domestik. UU PPRT bertujuan menata ulang hubungan pekerja rumah tangga dari yang semula informal menjadi memiliki kepastian hukum.

Selama ini hubungan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga sering dilandasi nilai kekeluargaan yang positif, nilai sosiokultural. Nilai tersebut tetap dipertahankan, tetapi dilengkapi dengan kerangka kerja profesional yang diakui dan dilindungi hukum.

"Undang-undang ini dijadikan menjadi kado yang terindah bagi seluruh Kartini di Indonesia," ujar Puan.

Pengesahan UU PPRT juga disambut tepuk tangan meriah dari anggota fraksi-fraksi DPR dan ratusan pekerja rumah tangga, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil yang turut mengawal proses sidang.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini dan perwakilan serikat PRT, yang hadir sejak pagi hari memenuhi balkon ruang paripurna, tak kuasa menahan air mata.

## Komitmen negara

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU PPRT menegaskan bahwa pengesahan RUU tersebut adalah bukti komitmen negara dalam memperkuat perlindungan dan pengawasan terhadap kerja pekerja rumah tangga.

Pengesahan UU PPRT adalah hasil dari perjuangan panjang yang dimulai sejak 1999 ketika Rumpun Tjoet Njak Dien melakukan riset tentang kondisi pekerja rumah tangga. Pada tahun 2004, Jaringan Nasional Advokasi Perlindungan PRT (Jala PRT) terbentuk dan mulai mengajukan draf RUU ke DPR.

Usulan pertama diajukan ke DPR tahun 2004 melalui Fraksi PAN, PKB, dan PDI-P, tetapi mandek. Tahun 2010-2014, RUU masuk dalam Daftar RUU Prioritas Periode 2010-2014 dengan Komisi IX membentuk Panja dan melakukan riset di 10 kota.

Namun, setelah itu, RUU PPRT bolak-balik masuk Prolegnas, tetapi tidak pernah dibahas. Hingga akhirnya pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR berjanji mengesahkan RUU PPRT dalam tiga bulan.

Pada 11 Maret 2026, Pleno Baleg menyelesaikan draf RUU PPRT. Pada 12 Maret 2026, pimpinan DPR menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Pada 15 April 2026, Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk pembahasan naskah RUU PPRT. Hanya dalam satu hari, pembahasan RUU ini diselesaikan dari tingkat Baleg hingga Panja, hingga disahkan menjadi undang-undang, Selasa.

Suranti (55), seorang PRT yang hadir, tak bisa menahan air mata saat diberi tahu UU PPRT disahkan DPR. "Senang banget, bersyukur," ucapnya.

Perasaan serupa diungkapkan Oom Umiyanti (49), aktivis Serikat PRT Sapu Lidi.

Luviana dan Jumisih dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengesahan RUU PPRT juga menyampaikan syukur atas disahkannya UU PPRT. "Terima kasih sama Baleg dan anggota legislatif yang sudah selesaikan rapat paripurna sehingga bisa mengesahkan UU PPRT," kata Jumisih.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menegaskan, penyelesaian RUU itu merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat. "Hari ini, kita menyelesaikan RUU PPRT yang sudah 22 tahun dijanjikan," ujarnya. (SON)